

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Akta 4*, 655-64.
- Aditama, P. N. (2018). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. *Jurnal Lex Renaissance 3*, 189-205.
- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia ( Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2015). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adolf, J. J., & Handoko, W. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius 13*, 181-92.
- Afifah, S. A. (2020). Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah. *Syah Kuala Law Journal 4*, 123-40.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amir, A. (2019). Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unsri*, 53.
- Andrie, A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2021). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1-10.
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara 15*, 929.
- Ardian, J. N. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara Pt Daya Kobelco Dan Pt Catur Batavia Transindo. *National Conference on Law Studies 2*, 978-79.
- Arikunto. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Ineka Cipta.

- Asril, J. (2020). Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah MEA* 4, 492-510.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, 95-102.
- Badu, S. A. (2017). Tugas Dan and Kewenangan Pejabat. *Lex Administratum*, 82-90.
- Bahsan, M. (2010). *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basir, M. A., Muhadi, J. F., & Sundary, R. I. (2021). Peran Dan Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah. *Acta Comitas*, 607.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 145-60.
- Budiono, D. (2023, Maret 5). *Persekutuan Perdata Doni Budiono & rekan*. Retrieved from Persekutuan Perdata: <https://pdb-lawfirm.id/subrogasi-perbankan-dalam-kredit-macet-kpr/>
- Dian Ekawati, A. P., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. e., & Prayitno, S. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *Jamaika: Jurnal Abdi Masyarakat Program Stud Teknik Informatika Universitas Pamulang* 2, 90-101.
- Diaz, R. R. (2019). Penyelenggaraan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Harta Bersama Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. *Cepalo* 3, 27.
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2021). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek. *Jurnal Penelitian Hukum Nomos*, 1-10.
- Dwi Lestari, L. A., & Hadi Santosa, A. G. (2021). Hak Subrogasi Penanggung Dalam Borgtocht. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, 549.
- Effendy, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, . Depok: Prenada Media Grup.
- Fatmawati, & Rachmi Handayani, I. A. (2008). Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif. *Jurnal Hukum UNS* 53, 287.
- Gaol, S. L. (2014). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, 91-109.

- Gaol, S. L. (2019). Kedudukan Dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 3.
- H.S., S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkriswono, H., & Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Prefentif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 120.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: Penerbit Djambatan.
- Hartana. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, 10.
- Hartono, C. S. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2-*. Bandung: Alumni.
- Hayati, N. (2016). Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). *Lex Jurnalica* 13, 278-89.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hoecke, M. V., & Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indera Sakti, S. T., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law*, 144.
- Irvan, M., Warman, K., & Arnetti, S. (2019). Pewarisan Dalam and Perkawinan Campuran. *LamLaj*, 148-61.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, cetakan 4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara The Position of Authentic Deeds in Relation to The Constitutional Rights of Citizens. *Jurnal Konsitusi* 15, 801.
- J, S. (2007). *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kadir, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Kansil, C., Christine, Kansil, S., R, E., Palandeng, & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Kelsen, H. (2011). *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Ketut, T. I. (2016). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dam Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah 1*, 188-95.
- Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. (2018). *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana Acta Comitatus*, 41-58.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kristina, Y., & Susilo, H. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1-24.
- Kurniawati, Y. (2020). Perbandingan Subrogasi Dan Cessie Berdasarkan Hukum Civil Law Dan Common Law. *Jurnal Ilmiah*, 16.
- Mahrus, M. L., Kustiani, N. A., & Prabowo, M. (2020). Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 32-48.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maulidi, M. J., Arba, M., & Kaharuddin. (2017). Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Akta Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 417.
- Maulidi, M. J., Arba, M., & Kaharuddin. (2017). Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan 5*, 414.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murni, C. S. (2021). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1*, 25.

- Muzakki, I. (2023, Februari 27). *Kantor Advokat Ismail Muzakki, S.H., M.H.* Retrieved from Kantor Advokat: <http://ismailmuzakki.com/pengalihan-kredit-macet-tanpa-pemberitahuan/>
- Naki, J. (2019). Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Bw)1. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* 7, 31-38.
- Napitupulu, L. M. (2018). Analisis Yuridis Subrogasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kabanjahe. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 18-21.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Ngadenan, S. (2013). Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur Di Mungkid. *Law Reform*, 1-9.
- Ningsih, A. S. (2018). Ayu Sulistiya Ningsih, “Aspek Hukum dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO 28 K/Pdt/2016). *Jurnal Pro Hukum* 7, 1-12.
- Ningtyas, A. Y., & Priandhini, L. (2022). Peran Notaris dan PPAT Dalam Mengoptimalkan Penyelenggaraan Rumah Susun Indonesia. *Pakuan Law Review*, 120-135.
- Nopitayuni, N. K., & Sukerti, N. N. (2017). Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum* 5, 1-5.
- Nopitayuni, N. K., & Sukerti, N. N. (2017). Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-5.
- Notohamidjojo, o. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Novidianto, T., & Retnowati, T. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan Dan Jaminan Yang dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang sama. *Jurnal Ilmiah Hukum Al'Adl*, 114.
- Nugraha, S. (2023, Maret 3). *Logika Hukum*. Retrieved from Logika Hukum: <https://logikahukum.com/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian-secara-sepihak/>
- Pahlefi, P., Raffles, R., & Malik, H. (2019). Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Gorontalo Law Review* 2, 72.

- Pandoman, A. (2016). *Rangkuman Intisari Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*. Yogyakarta: Diklat .
- Pandoman, A. (2017). *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi.
- Paputungan, N. (2016). Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit. *Lex Privatum*, 131-25.
- Perolehan Hak Milik Atas Tanah Melalui Proses Lelang. (2022). *Jurnal Prefensi Hukum* 3, 551-56.
- Pramono, Y. Y. (2017). Tanggung Gugat Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan. *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, 1.
- Pratiwi, S. M. (2014). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*. Denpasar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Prawira, I. (2016). Responsibility of the Conveyancer Against Selling Land Deed. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, 65.
- Punarbawa, P. A. (2018). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. *e-journal Ilmu Hukum Kerta Semaya*, 4.
- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Vol. 3 No., no. e-ISSN: 2502-7573*, 47.
- Putra, P. Y., Budiarta, I. P., & Arini, D. G. (2021). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 202-6.
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-sama. *Notary Law Journal*, 2808-7348.
- Putri, N. N., & Satrianingsih, A. W. (2018). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, 2-3.
- R. S., & R. T. (2000). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, M. F. (2014). Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1-21.

- Rahmawati, A. C. (2020). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Secara Di Bawah Tangan. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan* 3.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Riwu, G. G., Wijaya, I. K., & Widiati, I. P. (2022). Perolehan Hak Milik Atas Tanah Melalui Proses Lelang. *Jurnal Prefensi Hukum* 3, 551-56.
- Riyanto, A. (2017). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, 1.
- S. S., & Amalia, R. A. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara* 36, 126.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Sari, I. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen* 9, 15-33.
- Sari, I. D., Wai, I. N., Subha, R. M., & Resen, K. A. (2018). Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana Acta Comitas*, 41-58.
- Satrio, J. (1991). *Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompentatie & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni.
- setiawan, d., & Wardani, W. I. (2022). Devi Setiawan and Widyarini Indriasti Wardani, "Analisa Hukum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bersubsidi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Kantor Cabang Semarang. *Notary Law Research*, 52.
- Setiawan, I. O. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setyaningsih. (2018). Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Purwokerto. *Jurnal Akta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula*, 190.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revlika Aditama.

- Sibuea , & Romauli, M. A. (2023). Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Dalam Komparasi. *Jurnal Suara Hukum* 4, 137-59.
- Sitorius, O., & Sierrad, H. Z. (2006). *Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soetiknyo, I. (2008). *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta: Gaja Mada University.
- Subekti, R. (1998). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Suharnoko. (2005). *Doktrin Subrogatie, Novasi, dan Cessie*. Jakarta: Kencana.
- Supriyanto. (2018). Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan. *Jurnal Ilmiah Yure Humano*, 95.
- Supriyanto, E. (2018). Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan. *Yure Humano* 2, 70-95.
- Sutarno. (2004). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: sinar grafika.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- T. A., Y. M., & B. A. (2019). Kepastian Hukum Menyangkut Objek Hak Tanggungan Belum Terdaftar Yang Dijadikan Jaminan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, 235-51.
- T. B. (2014). Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Premise Law Journal*, 6.
- Takalamingan, H. F., Saerang, D., & M. K. (2018). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14, 830-40.
- Tjukup, I. K. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus*, 180-88.
- Triwahyuni, A. D. (2020). Abdullah Dian Triwahyuni, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Acts Comitatus* 5, 1.



- Untung, B. (2015). *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Utama, W. A., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti. *Jurnal Panorama Hukum* , 105-24.
- Widjaya, G., & Mulyadi, K. (2003). *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiguna, K. O. (2017). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada PT. BPR Partha Kencana Tohpati. *e-journal ilmu hukum kertha semaya*, 8.
- Yulianto. (2004). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*. Surabaya: Mitra Usaha Abadi.
- Yustisia, R. A., Permadi, I., & Andrijani, I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi (Studi Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kediri). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan*, 1-21.
- Zulhadji, A. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Crimen* 5, 31-35.